

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemerintah lokal (*local government*) di Indonesia merespons ancaman terorisme global Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS).¹ Sebagaimana dipahami, ISIS menjadi perhatian dunia internasional karena eksistensinya menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui tindakan radikal, ekstrem, dan anarkis yang dilakukannya. ISIS bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam (*Islamic State*) dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Syria (Suriah).²

Upaya untuk mencapai tujuan politisnya tersebut, salah satunya, dilakukan dengan menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Propaganda-propaganda tersebut disebarkan melalui beragam instrumen teknologi informasi dan komunikasi sehingga kemudian mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad. Dengan demikian, ISIS bukan sekadar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional.

Menurut Berger, perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

¹ Dalam bahasa Arab, ISIS disebut *Ad-daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa As-Syam*. Syam merupakan istilah Arab klasik untuk Damaskus (Suriah/Syria). Namun, Syam tidak hanya mencakup Suriah tetapi juga Israel, Yordania, Lebanon, dan wilayah Palestina, dan bahkan bagian tenggara Turki. Oleh pakar Barat, daerah tersebut disebut sebagai *The Levant*. Karena itu, beberapa pihak dan media Barat menggunakan nama Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State of Iraq and al-Sham. Lebih lanjut, sejak 29 Juni 2014 ISIS menamakan dirinya sebagai Islamic State (IS). Sekalipun saat ini bernama IS, dalam penelitian ini tetap digunakan istilah ISIS yang merujuk pada Islamic State of Iraq and Syria, karena singkatan tersebut lebih familiar di masyarakat internasional serta media-media *mainstream* umumnya masih menggunakan kata ISIS daripada IS. Dalam konteks Indonesia, istilah ISIS juga lebih dikenal dibanding IS.

² Mengenai sejarah dan latar belakang terbentuknya ISIS akan diuraikan lebih lanjut pada bab kedua.

via internet dan jejaring media sosial secara efektif.³ Hal itu menunjukkan bahwa fitur-fitur globalisasi, selain sebagai penyebab, sekaligus juga menjadi instrumen atau fasilitas bagi penyemaian gerakan-gerakan perlawanan berbasis agama. Disebut sebagai penyebab, karena kemunculan radikalisme dan ekstremisme atas dasar agama acap kali disebut sebagai respons terhadap patologi globalisasi.⁴

Akibat patologi tersebut, globalisasi kemudian melahirkan pihak-pihak yang resisten, salah satu bentuknya berupa radikalisme dan ekstremisme berdasar agama.⁵ Paralelisme globalisasi sebagai penyebab sekaligus instrumen itulah yang berkontribusi bagi eksistensi ISIS. Selain memanfaatkan fitur globalisasi berupa kemajuan teknologi untuk “mengundang” perjuangan jihad, fitur globalisasi itu pula yang menyebarkan ideologi ISIS ke berbagai negara sehingga dapat disebut sebagai gerakan transnasional, sekaligus sebagai ancaman global.

Pandangan lain mengatakan bahwa kemunculan ISIS tidak terlepas dari kontribusi Amerika Serikat (AS).⁶ Menurut Chenghu, ISIS justru menjadi

³ J. M. Berger, 2014, “How ISIS Games Twitter,” [online] <http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/> (diakses pada 04/10/2014).

⁴ Globalisasi dinilai melahirkan patologi, baik dalam konteks ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Baca Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Depok: Penerbit Koekoesan, 2010), hal. 14.

⁵ Globalisasi dinilai cenderung meminggirkan aspirasi keagamaan dan menjadikan masyarakat tercerabut dari akar-akar identitasnya, kemudian menyisakan ruang kosong yang diisi dengan munculnya fundamentalisme dan ekstremisme yang acap kali radikal. Lihat Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004), hal. x.

Resistensi terhadap globalisasi banyak terjadi di dalam Islam. Menurut Yom, banyak ilmuwan mengajukan tesis bahwa Islam sering kurang sejalan dalam beradaptasi dengan masyarakat global karena Islam secara instinktif berposisi dengan globalisasi dan nilai-nilai sekuler yang dibawanya. Globalisasi dipandang sebagai bentuk imperialisme baru Barat, Westernisasi, bahkan Amerikanisasi yang tidak sejalan dengan identitas kultural masyarakat Islam. Huntington kemudian menyebutnya sebagai benturan antar peradaban (*clash of civilization*). Oleh Benjamin Barber, kenyataan tersebut dianalogikan sebagai perlawanan “Jihad” versus “McWorld” yang berada pada posisi diametral dan saling berlawanan.

Lihat antara lain, Seal L. Yom, “Islam and Globalization: Secularism, Religion, and Radicalism,” *International Politics and Society* 4/2002; James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialisme the 21th Century* (London: Zed Books, 2001); Benjamin R. Barber, *Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World* (New York: Ballantine Books, 1995); Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban*.

⁶ Pandangan mengenai kemunculan ISIS yang tidak terlepas dari peran AS, seolah dipertegas oleh pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam buku memoarnya berjudul *Hard Choice*, bahwa ISIS dibentuk oleh pemerintah AS bersama dan negara-negara Barat sekutunya untuk memecah belah Timur Tengah dan menjadikan kawasan itu senantiasa bergejolak. Lihat Peter Weber, “America Created the Islamic State of Iraq and Syria? Meet the

instrument of terror yang didesain oleh AS untuk memperoleh kepentingan politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Menurut pandangan ini, invasi ke Irak melahirkan kelompok perlawanan Sunni terhadap Syiah, yang kemudian disokong oleh AS. Dengan demikian, AS berada di belakang ISIS dan ISIS menjadi momentum baru bagi AS untuk meneguhkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.⁷

Terlepas dari itu, data National Counter Terrorism Center AS pada Februari 2015 menyebutkan bahwa lebih dari 20.000 pejuang asing (*foreign fighters*) yang berasal dari lebih 90 negara telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS.⁸ International Criminal Court juga menyebut ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).⁹ Atas tindakan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan ISIS organisasi terorisme internasional atau terorisme global yang harus dilawan oleh setiap negara.¹⁰ Tidak

ISIS 'Truthers', *The Week*, 2 September 2014, [online] <http://theweek.com/articles/444103/america-created-islamic-state-iraq-syria-meet-isis-truthers> (diakses pada 18/03/2015).

⁷ Baca antara lain, Garikai Chengu, "War on Terror is Terrorism: How the US Helped Create Al Qaeda and ISIS," *Counter Punch*, Weekend Edition September 19-21, 2014, [online] <http://www.counterpunch.org/2014/09/19/how-the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis/> (diakses pada 06/03/2015); Aidan Cron, "ISIS: Born in the US," [online] <http://ehschronicle.com/2015/02/isis-born-in-the-usa/> (diakses pada 06/03/2015); Marwan Bishara, "SIL, CIA, Mossad, Quds Force, etc," *Al Jazeera*, 26 Februari 2015, [online] <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/02/daesh-cia-mossad-quds-force-150226052024592.html> (diakses pada 06/03/2015).

⁸ Sebanyak 3.400 di antaranya berasal dari negara-negara Barat, seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Selebihnya, berasal dari negara-negara Timur Tengah yang merupakan jumlah terbanyak dan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jamie Crawford, "U.S. Officials Warn of Increase of ISIS Foreign Fighters," [online] <http://edition.cnn.com/2015/02/10/politics/isis-foreign-fighters-combat/> (diakses pada 11/02/2015).

⁹ Erin Branco, "ISIS Executions: 1,000 Iraqi Civilians Killed In ISIS-Controlled Towns Since June, Hundreds More Found In Mass Graves," [online] <http://www.ibtimes.com/isis-executions-1000-iraqi-civilians-killed-isis-controlled-towns-june-hundreds-more-found-1718076> (diakses pada 11/02/2015).

¹⁰ Selain itu, beberapa negara juga telah memasukkan ISIS sebagai organisasi teroris, seperti Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Indonesia, Malaysia, Turki, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, India, dan Rusia. Lihat Organization of Islamic Cooperation, "Islamic Response to the Islamic State of Iraq and the Levant," *MISH Model United Nations* 2015, hal. 9. Atas dasar itu pula, sebanyak 40 negara pada 15 September 2014 bertemu di Paris untuk membahas strategi melumpuhkan ISIS sebagai respons atas ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Hasilnya, pasukan koalisi internasional (*international coalition against ISIS*) yang dipimpin AS bersama beberapa negara kemudian melancarkan serangan militer

hanya itu, laporan the Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC) pada pertengahan November 2014 mengidentifikasi sekitar 60 kelompok jihadis di 30 negara menyatakan mendukung ISIS.¹¹

Selain itu, melalui beragam cara dan instrumen, ideologi ISIS juga tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada 23 Juli 2014 beredar video di *Youtube* berjudul "Join the Ranks"¹² yang berisi seruan jihad untuk mendukung ISIS, yang kemudian diikuti dengan banyaknya simpatisan yang mendukung ISIS di berbagai daerah.¹³ Sekalipun tidak ada angka pasti mengenai jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan jihad ke Irak dan Syria dan bergabung

terhadap ISIS. Hingga Desember 2014, sebanyak 62 negara telah bergabung sebagai anggota dari *global coalition to degrade and defeat ISIS*. Bahkan hingga penelitian ini ditulis perang antara ISIS dan pasukan koalisi internasional masih berlangsung. Baca Justine Drennan, "Who Has Contributed What in the Coalition Against the Islamic State?" [online] <http://foreignpolicy.com/2014/11/12/who-has-contributed-what-in-the-coalition-against-the-islamic-state/> (diakses pada 14/02/2015).

¹¹ Sebagian dari kelompok jihadis tersebut awalnya berafiliasi dengan al-Qaida. Beberapa kelompok jihadis yang menyatakan memberikan dukungan terhadap ISIS tersebut adalah Boko Haram, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Jemaah Islamiyah, Ansar al-Sharia (Tunisia), Ansar al-Sharia (Libya), Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem, Islamic Movement of Uzbekistan, serta Jamaah Ansharut Tauhid. Lihat Organization of Islamic Cooperation, *Islamic Response*, hal. 11.

¹² Video propaganda jihad yang menargetkan warga Indonesia untuk bergabung bersama ISIS. Video berdurasi sekitar delapan menit tersebut diunggah ke *Youtube* pada 22 Juli 2014 dan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan penelusuran intelijen, orang yang tampil di video tersebut adalah Bahrumsyah atau menyebut dirinya sebagai Abu Muhammad al-Indonesiy, seorang terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Berdasarkan penuturan Kepala Polri Jend. Sutarmanto, Bahrumsyah masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diburu lebih dari satu tahun karena terlibat berbagai aksi terorisme. Tia Mariatul Kibitia, "The Contemporary Islamic State of Indonesia: Threat and Challenges," *Middle East Institute*, 14 Januari 2015, [online] <http://www.mei.edu/content/map/contemporary-islamic-state-indonesia-threats-and-challenges> (diakses pada 11/02/2015); "Police to Track Down Indonesians on ISIL Video," *The Jakarta Post*, 7 Agustus 2015, [online] <http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/07/police-track-down-indonesians-isil-video.html> (diakses pada 11/02/2015).

¹³ Beberapa daerah yang diisukan telah ditembus oleh jaringan ISIS antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Surabaya, Ngawi, Solo, Malang, Makassar, Poso, serta Bima. Ekspansi ISIS ke berbagai daerah kemudian direspons oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 450/3806/SJ yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota, berisi perintah peran aktif kepala daerah dalam penanganan penyebaran paham dan ideologi ISIS di Indonesia. Istiqomatul, "Kenapa Solo Disebut Basis Gerakan ISIS?" *Tempo*, 8 Agustus 2014, [online] <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/08/078598073/Kenapa-Solo-Disebut-Basis-Gerakan-ISIS/1/0> (diakses pada 17/02/2015); "Kepala Daerah Wajib Cegah ISIS," *Jawa Pos*, 8 Agustus 2014, [online] <http://www.jawapos.com/baca/artikel/5572/Kepala-Daerah-Wajib-Cegah-ISIS-> (diakses pada 17/02/2015).

dengan ISIS, namun pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap WNI di luar negeri.¹⁴

Sebagai respons, sejak 4 Agustus 2014 pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian secara resmi melarang ISIS di Indonesia, baik secara formal maupun informal. Pemerintah memandang bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia.¹⁵ Pemerintah Indonesia kemudian melakukan sejumlah langkah sebagai respons terhadap ISIS, di antaranya mencakup pencegahan WNI ke Suriah atau Irak, pemantauan yang ketat terhadap WNI yang diketahui berada di Suriah, menegatkan pengelolaan terorisme di lembaga pemasyarakatan,¹⁶ serta pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai rawan, dan juga melalui penegakan hukum.¹⁷

Sikap pemerintah pusat tersebut juga direspons oleh pemerintah di level provinsi. Provinsi Jawa Timur, misalnya, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan ISIS.¹⁸ Munculnya Pergub

¹⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa ada sebanyak 34 WNI yang telah bergabung dengan ISIS dari lebih 100 orang yang melakukan jihad ke Timur Tengah. *The Wall Street Journal* menyebut sebanyak 60 orang. *The Sydney Morning Herald* menulis antara 50 hingga 500 orang. Sementara Kepolisian RI menyebut sebanyak 56 orang WNI yang berjuang di Suriah dan 4 di antaranya telah meninggal karena bom bunuh diri. Data pada Maret 2015, sebanyak 16 WNI ditahan di Turki saat akan memasuki Suriah. Mereka diduga akan bergabung dengan ISIS. Lihat Institute of Policy Analysis of Conflict, "The Evolution of ISIS in Indonesia," *IPAC Report No. 13*, 24 September 2014, hal. 18-19; Maren Killackey, "Indonesia's Tepid Response to ISIS" [online] <http://cpreview.org/2014/09/indonesias-tepid-response-to-isis/> (diakses pada 11/02/2015); Simone Roworth, "Foreign Fighters and Southeast Asia" [online] <http://www.aspistrategist.org.au/foreign-fighters-and-southeast-asia/> (diakses pada 11/02/2015).

¹⁵ Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, sebagaimana dikutip Harian *The Jakarta Post*, bahwa "[ISIS] is not in line with state ideology, Pancasila, or the philosophy of diversity [kebhinekaan] under the unitary state of the Republic of Indonesia." Lihat Frances Martel, "Indonesia Criminalizes Support for ISIS," [online] <http://www.breitbart.com/national-security/2014/08/06/indonesia-criminalizes-support-for-isis/> (diakses pada 11/2/2015).

¹⁶ Ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. Pas-330.PK.01.04.03 tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terkait Aktivitas Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pada 5 Agustus 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Lihat Sabrina Asril, "Ini Tujuh Instruksi Presiden Untuk Pencegahan Paham ISIS," *Kompas*, 14 September 2014, [online] <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/14/23185721/Ini.Tujuh.Instruksi.President.untuk.Pencegahan.Paham.ISIS> (diakses pada 14/02/2015).

¹⁸ Lihat Achmad Faizal, "Ini Isi Peraturan Gubernur Jatim soal Larangan ISIS di Jatim," *Kompas*, 12 August 2014, [online]

tersebut didasarkan karena wilayah Jawa Timur dipandang sebagai “rahim” terorisme dan juga perkembangan paham revivalisme Islam,¹⁹ termasuk ISIS.²⁰ Karenanya, menjadi menarik kemudian untuk menganalisis bagaimana respons pemerintah daerah di level kabupaten/kota dalam menyikapi hal itu, khususnya terkait ancaman ISIS. Perlunya menganalisis respons pemerintah daerah (*local government*) terhadap ancaman ISIS semakin signifikan karena belum ditemukan pada kajian-kajian atau penelitian terdahulu.

Sebagaimana dikonfirmasi pada penelitian terdahulu, kajian terkait respons terhadap isu dan ancaman ISIS ini lebih banyak dilakukan pada level analisis global atau internasional, regional dan multilateral, serta level negara. Penelusuran literatur yang dilakukan penulis belum menemukan analisis terkait respons terhadap ancaman ISIS pada level pemerintah lokal, setidaknya dalam konteks Indonesia. Sehingga, terdapat celah empiris dan teoritik yang menjadikan penelitian ini signifikan dan problematis untuk dilakukan. Padahal, respons dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di level kabupaten/kota menjadi penting sebab merupakan eksekutor di lapangan terkait sikap pemerintah pusat

<http://regional.kompas.com/read/2014/08/12/20093251/Ini.Isi.Peraturan.Gubernur.soal.Larangan.ISIS.di.Jatim>. (diakses pada 14/02/2015).

¹⁹ Revivalisme Islam dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk menyebut paham, kelompok, gerakan, organisasi, atau individu yang menginginkan kebangkitan kembali Islam melalui upaya penegakan syariat Islam hingga pendirian Khilafah Islamiyah, baik yang melalui cara-cara moderat maupun yang radikal. Istilah “revivalisme Islam” akan digunakan secara bergantian dengan istilah “kebangkitan Islam” sesuai dengan konteks kalimat yang menyertai.

²⁰ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Zainal Muhtadien membenarkan bahwa Jawa Timur dikatakan sebagai “rahim” pergerakan dan paham terorisme. Sebab, rata-rata pembenihan paham dilakukan di Jawa Timur kemudian dikembangkan dan melakukan aksi keluar Jawa Timur. Adapun daerah yang mendapat perhatian, di antaranya adalah Lamongan, Magetan, Sidoarjo, dan Malang. Baca Slamet Sudarmojo, “Jawa Timur Rawan Penyebaran ISIS,” *Antara*, 4 September 2014, [online] <http://www.antaranews.com/berita/451951/jawa-timur-rawan-penyebaran-isis> (diakses pada 14/02/2015).

Menurut Ali Fauzi, mantan pejuang di Afghanistan, Moro, dan Ambon, ada 20 hingga 40 kepala keluarga di Jawa Timur yang terindikasi sebagai pengikut paham ISIS. Selain itu, pihaknya menyebut bahwa sejumlah teroris dan terduga teroris berasal dari daerah di Jawa Timur. Indikasi lain yang membuat Jawa Timur “berbahaya”, menurut Fauzi, adalah berangkatnya sejumlah warga Jawa Timur ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS pada Juli 2014. “Hasil penelitian saya, memang Jatim menjadi wilayah reproduksi bagi mereka yang punya kemauan untuk bertindak dan bergabung dengan paham ISIS,” kata Ali Fauzi. Lihat dalam *ibid*; juga baca Nofika Dian Nugroho, — Ali Fauzi: Jawa Timur Rahim Terorisme,” *Tempo*, 4 September 2014, [online] <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/04/058604589/Ali-Fauzi-Jawa-Timur-Rahim-Terrorisme> (diakses pada 14/02/2015).

maupun pemerintah provinsi. Terlebih lagi, pemerintah di level kabupaten/kota adalah pihak yang bersentuhan langsung oleh masyarakat di lapangan sehingga dipandang mengetahui secara detail serta memiliki data mengenai isu dan ancaman ISIS.

Dasar itulah yang menjadikan penelitian ini penting untuk melihat bagaimana respons pemerintah di level kabupaten/kota dalam menyikapi ancaman terorisme global ISIS. Secara spesifik, pemerintah lokal yang menjadi objek penelitian adalah Pemkot Malang. Alasan mengapa Kota Malang menjadi penting adalah karena Malang menjadi salah satu titik yang dipantau untuk mencegah penyebaran ISIS.²¹ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang *concern* pada isu-isu kerukunan beragama juga mensinyalir ada lima masjid yang diindikasikan sebagai tempat penyebaran aliran dan paham seperti ISIS.²²

Selain itu, di wilayah Malang sempat pula beredar Majalah *al-Mustaqbal* yang memuat soal visi dan misi ISIS.²³ Beredar pula video seruan jihad yang

²¹ Kepolisian Daerah Jawa Timur memperketat dan pemantauan di tujuh titik yang menjadi penyebaran kelompok ISIS ini, antara lain di Ngawi, Malang, Lamongan, dan Sidoarjo. "Cegah ISIS, Polda Jatim Pantau Tujuh Titik," *Jatimprov.go.id*, 15 Agustus 2014, [online] <http://www.jatimprov.go.id/site/cegah-isis-polda-jatim-pantau-tujuh-titik/> (diakses pada 14/02/2015).

Malang menjadi titik pantau terutama karena pada Juli 2014, sebuah masjid di wilayah Malang menjadi tempat deklarasi Ansharul Khilafah Jawa Timur, yang secara ideologis sejalan dengan paham ISIS. Sekalipun juru bicara Ansharul Khilafah (AK) Jawa Timur Muhammad Romly menolak untuk mengakui bahwa AK merupakan jaringan ISIS, namun dalam kegiatan yang bertajuk "Sosialisasi dan Deklarasi Ansharul Khilafah" di Masjid Jami Sulaiman Al Hunaishil di Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Malang, pembicara pada kegiatan itu menjelaskan jika di Irak telah tegak Khilafah Islamiyah dan di bagian akhir para anggota jemaah yang hadir dibaiat untuk menyatakan setia kepada amir Daulah Khilafah Islamiyah, Abu Bakar al-Baghdadi. Lihat Eko Widiyanto, "Pendukung Pemimpin Milisi ISIS di Baiat di Malang," *Tempo*, 21 Juli 2014, [online] <http://www.tempo.co/read/news/2014/07/21/078594528/pendukung-pemimpin-milisi-isis-dibaiat-di-malang> (diakses pada 14/02/2015).

²² Kelima masjid yang ada dalam pantauan itu seluruhnya berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yakni dua masjid yang berada di kawasan Tlogomas, masjid di Jalan Veteran, masjid di Jalan Bendungan Sigura-gura, serta masjid di wilayah Dinoyo. Lihat Didi Syafirdi, "Masjid Disinyalir Jadi Tempat Penyebaran Paham ISIS di Malang," *Merdeka.com*, 19 Agustus 2014, [online] <http://www.merdeka.com/peristiwa/5-masjid-disinyalir-jadi-tempat-penyebaran-paham-isis-di-malang.html> (diakses pada 14/02/2015).

²³ Majalah tersebut juga memuat foto pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Pada bagian sampul belakang majalah juga tercantum nomor rekening BCA dan Bank Muamalat untuk donasi jihad media atas nama Tuah Febriwansyah. Majalah tersebut diketahui dibagi-bagikan pada saat deklarasi jemaah Ansharul Khilafah Jawa Timur. Yatimul Ainun, "Majalah ISIS Beredar di Malang," *Kompas*, 6 Agustus 2014, [online]

menampilkan Salim Mubarak Attamimi Al Indunusiy yang disebut merupakan milisi ISIS yang berasal dari Kota Malang.²⁴ Serangkaian isu dan ancaman terkait eksistensi ISIS tersebut kemudian melahirkan deklarasi menolak segala bentuk kegiatan ISIS di Kota Malang.²⁵ Bahkan, pada 25 Maret 2015, tiga orang anggota ISIS ditangkap di Kota Malang.²⁶ Hal ini menunjukkan fakta mengenai adanya jaringan ISIS di Kota Malang. Lebih dari itu, penelitian pada Kota Malang menjadi penting karena dikenal sebagai kota pendidikan di mana sebagai besar perguruan tinggi yang ada di Malang Raya²⁷ berada di Kota Malang sehingga sangat potensial bagi masuk dan berkembangnya jaringan ISIS ke berbagai kampus dan mahasiswa. Hal itu ditegaskan oleh Hussain dan Saltman bahwa perguruan tinggi sebagai “hotbeds” yang cukup potensial bagi radikalisisasi.²⁸

2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian (*research questions*) dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah lokal, dalam hal ini Pemkot Malang, merespons ancaman terorisme global ISIS?

<http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/17202971/Majalah.ISIS.Beredar.di.Malang> (diakses pada 14/02/2015).

²⁴ Dalam video itu, Salim melakukan propaganda jihad ke Irak dan Suriah dengan menyitir dua ayat tentang jihad dalam surat At-Taubah ayat 24 dan 41. Video ditutup dengan seruan, “*Khawani fillah*, berangkatlah kalian, segerakanlah diri kalian pergi ke negeri Syam.” Diketahui bahwa saudara dan keluarga Salim tinggal di Malang. Orang tua Salim sebelumnya tinggal di kawasan Ampel, sebuah perkampungan Arab di Surabaya, kemudian pindah dan menetap di Malang hingga sekarang. Lihat Tri Wahono (ed.), “Video Seruan Jihad Milisi ISIS Asal Malang Muncul di YouTube,” *Kompas*, 13 Agustus 2014, [online] <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/13/11440441/Video.Seruan.Jihad.Milisi.ISIS.Asal.Malang.Muncul.di.YouTube> (diakses pada 14/02/2015).

²⁵ Baca “Kota Malang Deklarasi Menolak ISIS,” [online] <http://bakesbangpol.malangkota.go.id/2014/08/22/kota-malang-deklarasi-menolak-isis/> (diakses pada 17/02/2015).

²⁶ Baca Suriyanto, “Figa Terduga ISIS Ditangkap di Malang”, *CNN Indonesia*, 26 Maret 2015, [online] <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150326115043-12-42039/tiga-terduga-isis-ditangkap-di-malang/> (diakses pada 31/03/2015). Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga orang anggota ISIS yang ditangkap oleh Densus 88 di Kota Malang diuraikan pada bab dua.

²⁷ Perlu dijelaskan, bahwa wilayah Malang Raya terdiri dari tiga wilayah administratif, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Namun, penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah Kota Malang. Lebih lanjut, berdasarkan data *ngalam.web.id*, jumlah perguruan tinggi di Kota Malang, baik negeri maupun swasta, sebanyak 62. Sementara di Kabupaten Malang, sekalipun merupakan wilayah terluas dari Malang Raya, terdapat 19 perguruan tinggi dan di Kota Batu sebanyak 6.

²⁸ Ghaffar Hussain dan Erin Marie Saltman, *Jihad Tranding: A Comprehensive Analysis of Online Extremism and How to Counter It* (New York: Quilliam, 2014), hal. 72.

Untuk menghasilkan temuan dan kajian yang komprehensif, pertanyaan utama tersebut diturunkan ke dalam beberapa sub pertanyaan, yakni: 1) Bagaimana pemerintah memandang eksistensi ISIS?; 2) Bagaimana informasi dan pengetahuan tentang jaringan ISIS yang dimiliki pemerintah?; 3) Bagaimana jaringan ISIS dapat masuk ke daerah setempat?; 4) Apa yang dilakukan pemerintah dalam merespons ancaman ISIS?; 5) Bagaimana bentuk *security governance* yang dipraktikkan?; 6) Bagaimana kaitan respons tersebut dengan konteks nasional dan internasional?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respons pemerintah lokal di level kabupaten/kota, dalam hal ini Pemkot Malang, dalam menyikapi ancaman terorisme global ISIS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat, baik dalam tataran praktis maupun akademis. Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyuguhkan informasi mengenai ancaman dan eksistensi terorisme global ISIS dan bagaimana pilihan respons terhadapnya. Sehingga, dalam jangka panjang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam menyikapi munculnya isu dan ancaman radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme di level lokal. Adapun dalam tataran akademis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih teoritik mengenai respons pemerintah lokal terkait radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme yang selama ini masih didominasi oleh kajian dengan level analisis sistem internasional, regional, dan negara. Dalam studi Hubungan Internasional, kajian semacam ini merupakan *international affairs*, di mana isu-isu global dikaji dari sudut pandang dan dimensi lokal.

4. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis, kajian mendalam mengenai respons serta upaya *counter* terhadap terorisme global ISIS oleh pemerintah lokal (*local government*) suatu negara belum dilakukan. Dalam skala yang lebih luas, kajian mengenai respons pemerintah lokal terkait ancaman terorisme antara lain dilakukan oleh Chapman et al. yang mengkaji penegakan

hukum dan mengidentifikasi respons terhadap ancaman terorisme yang perlu dilakukan di tingkatan pemerintah lokal AS dalam konteks manajemen teknologi informasi.²⁹ Kayyem dan Pangi juga mengedit sepuluh tulisan tentang respons negara dan pemerintah lokal di AS terhadap ancaman terorisme yang dipandang sebagai tantangan berkelanjutan (*sustainability challenges*) pasca peristiwa 11 September 2001.³⁰

Begitu pula Davis et al. mengkaji mengenai bagaimana kesiapan negara dan pemerintah lokal dalam usaha *combating* terorisme melalui penguatan organisasional.³¹ Hal yang sama dilakukan oleh Coaffe et al. mengenai bagaimana pemerintah kota di Inggris merespons ancaman terorisme yang dipandang sebagai *catastrophic* (bencana besar) terutama setelah peristiwa 11 September 2001. Usaha *counterterrorism* kemudian menghasilkan tindakan *prevent, pursue, protect, dan prepare*.³² Namun, semua kajian yang disebutkan di atas difokuskan pada ancaman serangan atau aksi terorisme secara fisik. Sementara penelitian ini memandang bahwa ancaman terorisme ISIS adalah ancaman ideologis, bukan sekadar ancaman fisik karena jaringan ISIS tidak melakukan aksi teror dengan menyerang target tertentu di berbagai tempat, seperti aksi teror yang dilakukan jaringan al-Qaida.

Terkait ancaman terorisme dari dimensi ideologi, pernah dikaji oleh Ahrari. Ahrari³³ mengkaji tentang upaya *counter* terhadap dukungan ideologis organisasi teroris di Ferghana Valley (secara geografis Ferghana Valley berada di antara Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Tajikistan), yakni Hizbut Tahrir (HT) dan Islamic Movement of Uzbekistan (IMU). Pemerintah Ferghana Valley kemudian merespons dengan mengadopsi tindakan internal dan eksternal untuk mengontrol

²⁹ Robert Chapman, et al., "Local Law Enforcement Responds to Terrorism: Lessons in Prevention and Preparedness," *Community Oriented Policing Services*, April 5, 2002 (Washington D.C.: The Police Foundation 2002).

³⁰ Juliette N. Kayyem dan Robyn L. Pangi (eds.) *First to Arrive: State and Local Responses to Terrorism* (Cambridge: The MIT Press, 2003).

³¹ Louis M. Davis, et al., *Combating Terrorism: How Prepared are State and Local Response Organizations?* (Santa Monica: RAND Corporation, 2006).

³² Jon Coaffe, et al., *The Everyday Resilience of the City: How Cities Respond to Terrorism and Disaster* (Macmillan: Palgrave Macmillan, 2009).

³³ Ehsan Ahrari, "Countering Ideological Support: The Case of the Ferghana Valley," dalam Anne Aldis dan Graeme P. Herd (eds.), *The Ideological War on Terror: Worldwide Strategic for Counter-Terrorism* (New York: Routledge, 2007), hal. 96-110.

atau bahkan membasmi ekspansi ideologi HT dan IMU dengan salah satunya melibatkan AS dan negara-negara di sekitarnya. Akan tetapi, objek kajian Ahrari adalah wilayah konflik (sengketa) dan terdapat perebutan kepentingan dari beberapa negara di sekitarnya, sehingga jelas berbeda dari objek penelitian ini.

Sementara itu, beberapa kajian yang mengulas tentang upaya *counter-ISIS* lebih bersifat preskriptif mengenai bagaimana strategi melumpuhkan ISIS. Hal tersebut dapat dipahami sebab fenomena dan ancaman global ISIS cenderung baru, di mana ISIS baru menjadi perhatian serius masyarakat internasional setidaknya pada tahun 2014 dan hingga penelitian ini ditulis ISIS masih menjadi *on going issue*. Namun demikian, dari kajian literatur yang dilakukan, secara umum tulisan terkait respons dan upaya *counter-ISIS* dapat diklasifikasikan berdasarkan level analisisnya. Level analisis yang dimaksud adalah pertama, respons dan upaya *counter-ISIS* pada level global atau komunitas internasional. Kedua, pada level regional dan multilateral dan ketiga pada level negara.

Pertama, pada level global, Gunaratna³⁴ menganalisis respons yang perlu dilakukan oleh komunitas internasional untuk melumpuhkan ISIS. Menurutnya, ISIS tidak bisa dieliminasi hanya dengan serangan udara semata atau secara militer seperti yang dilakukan koalisi internasional yang dipimpin oleh AS. Usaha yang dilakukan perlu bersifat multidimensional, melibatkan berbagai institusi, agensi, dan yurisdiksi, serta melalui *counter by cyber space*.³⁵ Senada dengan itu, Romulo³⁶ mengamini perlunya *“a united global response”*. *Global response* tersebut bersifat multisektoral dengan menggunakan politik, humanitarian, ekonomi, penguatan hukum, dan alat-alat intelijen untuk mendukung kekuatan militer. Namun, Romulo tetap memandang perlunya dominasi peran AS

³⁴ Rohan Gunaratna, “Global Threat Assessment New Threats on the Horizon?” *Counter Terrorism Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 5-8.

³⁵ Agar efektif maka perlu membendung ekspansi ideologi ISIS dan kelompok ekstremis lainnya serta memutus mata rantai sumber-sumber dukungan mereka, termasuk dalam hal pendanaan. Selain itu, menurutnya, pemerintah di setiap negara membutuhkan partner dengan organisasi-organisasi untuk meng-*counter* ideologi ekstremisme dan mempromosikan wacana Islam yang lebih moderat. Selain itu, dibutuhkan pula tindakan advokasi terhadap kebencian-kebencian agama. Serta, sekolah, organisasi pemuda, komunitas strategis, pemerintah dan pemimpin perlu mempromosikan perlunya hidup berdampingan secara damai, moderat, dan toleran. *Ibid.*

³⁶ Beth Day Romulo, “Can ISIS be Defeated?” *Manila Bulletin*, September 15, 2014.

memobilisasi musuh dan teman dalam sebuah koordinasi (*mobilizing America's allies and friends in a coordinated*).

Kedua, pada level multilateral, menurut Lim,³⁷ langkah militeristik AS yang menggandeng beberapa negara tidak akan efektif dalam menumpas ISIS. Berdasarkan kajian historis yang dilakukan oleh Lim mengenai kekalahan dan kegagalan AS seperti di Vietnam maupun dalam Perang Irak, menurutnya, ISIS memiliki kapabilitas untuk mengalahkan musuh-musuhnya melalui kekuatan jaringan dan pasukan yang dimiliki.³⁸ Karena itu, lanjut Lim, AS dan negara-negara lain perlu memikirkan cara lain yang tidak berorientasi pada serangan militer yang justru akan merugikan pihak AS dan negara-negara koalisi internasional sendiri.

Pada level regional, Arteaga³⁹ mengkaji respons negara-negara Uni Eropa dalam menyikapi ancaman ISIS. Menurut Arteaga, keputusan negara-negara UE bergabung dengan koalisi internasional melawan ISIS lahir setelah UE secara hati-hati (*carefully*) mempertimbangkan risiko terhadap kepentingan keamanan Eropa di masa akan datang. Karena itu, Arteaga sampai pada kesimpulan bahwa keterlibatan beberapa negara Eropa dilakukan dalam upaya mengantisipasi ancaman terorisme di masa yang akan datang seiring kembalinya para *fighters* dari Timur Tengah.

Ketiga, pada level negara, beberapa negara melakukan pendekatan hukum sebagai respons terhadap ancaman ISIS, antara lain seperti Malaysia, Myanmar, dan Pakistan. Chan⁴⁰ menganalisis respons pemerintah Malaysia terkait ISIS.

³⁷ Richard Lim, "Errorists, Insurgents and the Lessons of History," *National Security Watch* 14-2, 22 December 2014.

³⁸ Kata Lim, "ISIS' extremist ideology and its composition of fighters who have been hardened by a decade of war suggest that it has a high capacity to sustain losses. By undertaking primarily an air campaign, the United States is potentially succumbing to the same failed strategy that was used in Vietnam." *Ibid*, hal. 6.

³⁹ Felix Arteaga, "The European Union's Role in the Fight Against ISIS," *European Leadership Network*, 30 September 2014, [online] http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/arteaga-european-unions-role-in-the-fight-against-isis#.VOKw7Cx5q6Q (diakses pada 17/02/2014).

⁴⁰ Anton Chan, "Southeast Asia: Malaysia," *Counter Terroris Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 13-16.

Sebagai respons, pihak berwenang mengajukan tambahan legislasi untuk menangani secara spesifik terorisme, yakni Security Offence (Special Measures) Act (SOSMA).⁴¹ Pendekatan hukum juga dilakukan oleh Pakistan sebagaimana kajian Basit.⁴² Pemerintah kemudian merespons dengan mengeluarkan National Action Plan (NAP) pada Desember 2014 untuk membendung terorisme. Sebelumnya, pada awal 2014, pemerintah Pakistan membentuk National Internal Security Policy (NISP). Kemudian pada Juli 2014, parlemen meloloskan Pakistan Protection Bill yang menyediakan pasukan keamanan Pakistan dengan tambahan kekuatan untuk menghadapi terorisme.⁴³

Adapun Bashar⁴⁴ melihat respons pemerintah Myanmar dalam menyikapi ancaman terorisme, termasuk ISIS.⁴⁵ Sekalipun secara formal tidak terdapat ISIS di Myanmar, namun berdirinya al-Qaida in the Indian Sub-continent (AQIS) menjadi ancaman bagi Myanmar. Pasalnya, AQIS mengidentifikasi Myanmar sebagai tiga area fokus selain India dan Bangladesh. Untuk merespons itu, pada 4 Juni 2014, parlemen untuk pertama kali mengeluarkan Anti-Terrorism Law. Myanmar juga merencanakan untuk membentuk badan *counter terrorism (central*

⁴¹ SOSMA menggantikan Internal Security Act dan meng-cover isu-isu keamanan nasional, termasuk terorisme. Pada Desember 2014, pemerintah juga merilis White Paper on Terrorism yang memuat sejumlah langkah untuk memperkuat upaya mekanisme *counterterrorism* bagi aparat keamanan Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri Najib Razak menyampaikan "Forward Tackling the Threat of Islamic State" di depan parlemen bahwa ISIS berbahaya karena condong pada ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan dan kebencian. Aturan itu juga mengatur mengenai ketentuan yang mengizinkan informasi dari media sosial digunakan sebagai bukti untuk menuntut dan mengusut individu yang diduga jaringan atau diindikasikan sebagai militan. *Ibid.*

⁴² Abdul Basit, "South Asia: Pakistan," *Counter Terroris Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 41-45.

⁴³ Respons pemerintah Pakistan tersebut didasarkan pada alasan bahwa eksistensi ISIS membawa pengaruh bagi organisasi jihadis lokal Pakistan, karena ISIS dapat menarik simpati di antara kelompok jihadis di Pakistan. Ada tiga kelompok militan yang menyatakan diri mendukung ISIS, yakni Tehrik-e-Khliafat (Caliphate Movement), Jandullah (Soldiers of God), dan Tehrik-e-taliban Pakistan (TTP). Pada September 2014 pengikut ISIS juga mendistribusikan *booklet* berjudul *Fatah* (Kemenangan) yang berisi dua belas artikel yang bertujuan untuk merekrut sukarelawan dan menyebarkan ideologi ekstremisme ISIS di Pakistan.

⁴⁴ Iftekharul Bashar, "Southeast Asia: Myanmar," *Counter Terroris Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 17-20.

⁴⁵ Ancaman terorisme di Myanmar meningkat signifikan sejak tahun 2012 terjadi kerusuhan antara Muslim-Buddha serta adanya kelompok terorisme dari luar (Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara) yang menggunakan isu Rohingya untuk menarik simpati komunitas Muslim, seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), the Afghan Taliban, the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), Jama'ah Ansarut Tauhid.

counter-terrorism body) untuk membendung pendanaan terorisme dan sebagai *gateway security*.

Chan⁴⁶ juga mengkaji langkah pemerintah Singapura yang merespons ancaman ISIS secara militer.⁴⁷ Singapura menyikapi ISIS dengan terlibat mendukung koalisi internasional melawan ISIS. Pada Desember 2014, pemerintah Singapura mengumumkan akan mengirimkan pasukan Singapore Armed Force (SAF) ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan koalisi internasional melawan ISIS. Sementara itu, respons Iran sebagaimana dikaji oleh Esfandiary dan Tabatabai⁴⁸ menunjukkan hal yang menarik. Kebijakan Iran terkait ISIS menunjukkan sikap pragmatisme (*pragmatism in its foreign policy*).⁴⁹ Esfandiary dan Tabatabai menyebut strategi Iran sebagai *“leading from behind”* dengan mendukung berbagai kelompok yang kontra terhadap ISIS di dalam negeri Irak. Tujuannya, untuk memperkuat upaya rakyat Irak dalam usaha melindungi

⁴⁶ Anton Chan, “Southeast Asia: Singapore,” *Counter Terroris Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 28-29.

⁴⁷ Meskipun tidak ada kelompok teroris yang secara aktif beroperasi di Singapura, namun Singapura memandang ancaman radikalisme dan ekstremisme, khususnya ISIS merupakan ancaman bagi keamanan nasionalnya. Pada Oktober 2014, Deputy Perdana Menteri Teo Chee Hean mengatakan setidaknya hanya ada dua warga negara Singapura yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk berpartisipasi dalam konflik.

⁴⁸ Dina Esfandiary dan Ariane Tabatabai, “Iran’s ISIS Policy,” *International Affairs* 91: 1 (2015) 1-15, hal. 5.

⁴⁹ Pragmatisme itu ditunjukkan dengan strategi Iran yang bisa bersifat reaktif (*reactive*) dan fleksibel (*flexible*). Pragmatisme tersebut didasarkan karena Iran memiliki kepentingan strategis di Irak, baik secara keagamaan, ekonomi maupun secara politis di bawah kepemimpinan PM Irak Nouri al-Maliki. Bagi Iran, ISIS merupakan ancaman yang berasal dari kelompok ekstremis Sunni terlebih lagi karena bertujuan untuk menghancurkan (*annihilation*) kelompok Syiah serta menegakkan Negara Islam melalui implementasi Syariat Islam berbasis Sunni, sementara Iran merupakan negara dengan mayoritas penduduk Syiah. Karena itu, Iran tidak lagi hanya mewaspadaikan ISIS tetapi juga melibatkan diri secara semu (*from behind*) dalam usaha untuk mencegah potensi *spillover ideology* ISIS ke wilayahnya. Signifikansi Irak bagi Iran adalah karena Irak merupakan negara dengan populasi Syiah terbanyak kedua setelah Iran dan terdapat dua tempat penting dan suci di Irak bagi warga Syiah, yakni Karbala dan Najaf sehingga menjadi aset penting bagi Iran. Selain dari aspek religius, secara ekonomi, Irak memiliki posisi penting bagi Iran. Irak merupakan *top five partner* bagi perdagangan Iran. Relasi perdagangan keduanya tidak terlepas hubungan baik antara Taheran dan Baghdad di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang merupakan pemeluk Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa Irak dan Iran bukan lagi sebagai musuh seperti pengalaman perang Irak-Iran, tetapi kini menjadi *a strategic partner*. Dalam konteks keamanan, hubungan kedua negara juga semakin intensif. Oleh sebab itu, bagi Iran, dengan kemampuan mengendalikan instabilitas di Irak memberikan peluang besar bagi Iran untuk meningkatkan pengaruhnya. *Ibid.*

integritas teritorial negaranya dan persatuan nasional dari konflik sektarian yang selama ini menjadi kondisi alamiah.⁵⁰

Adapun mengenai respons Indonesia, Cam dan Sugara⁵¹ berusaha melakukan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia terkait respons kedua negara terhadap ISIS, di mana kedua negara mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap anggota atau simpatisan ISIS. Menurutnya, *hard approach* tidak dapat menghentikan penetrasi ide dan ideologi ekstremis di Asia Tenggara. Seperti yang dilakukan Indonesia, sejak Bom Bali 2002, pemerintah menekankan pendekatan militer (*hard approach*) dalam melawan ancaman terorisme, termasuk dengan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti-Teror 88. Hal yang sama dilakukan Malaysia dengan menangkap beberapa orang terduga teroris atau yang berafiliasi dengannya. Sekalipun menurut Cam dan Sugara, sejauh ini *hard approach* tersebut setidaknya dapat dikatakan sukses, namun keberadaan ISIS tidak sekadar bisa dihadapi dengan pendekatan keamanan.⁵²

⁵⁰ Selain itu, Iran menolak untuk melakukan serangan militer secara frontal sebagaimana yang dilakukan oleh Barat karena kemunculan ISIS tidak terlepas dari kebijakan Barat di kawasan di Timur Tengah. ISIS, menurut Iran, merupakan produk dari dua hal. Pertama, invasi AS ke Irak pada 2002 dan kehadiran *foreign fighters* yang menciptakan dinamika resistensi terhadap kebijakan AS. Kedua, adanya perasaan ketidakseimbangan (*disequilibrium*) pada masyarakat di beberapa negara pasca jatuhnya Saddam Husein dari tampuk kekuasaan Irak, sehingga mereka berusaha mengubah *status quo*. Karena itu, untuk menghadapi ISIS, menurut Iran, adalah dengan menghilangkan "tanah subur" (*fertile ground*) bagi persemaian ideologi radikal. Dengan kata lain, Iran memandang perlunya "dealing with interests and abuses of inequalities" will help combat the ideology of ISIS." Lihat *ibid.* hal. 6 dan 14.

⁵¹ Stefanie Cam dan Robi Sugara, "Indonesian and Malaysian IS Supproters, Need for 'Soft' Approach," *RSSI Commentaries*, No. 177, 2014 (Singapore: Nanyang Technological University, 2014).

⁵² Menurut Cam dan Sugara, ISIS mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan propaganda ide dan ideologi mereka. Internet menyediakan media yang sempurna bagi ISIS untuk merekrut, menyebarkan ideologi, dan memperoleh dana di Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia maupun Malaysia membutuhkan *soft approach* untuk melawan atau membendung penyebaran kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS via media sosial. Terlebih lagi karena penyebaran ideologi ISIS di Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari kontribusi media sosial, seperti *YouTube* dan *Facebook*. Indonesia dan Malaysia perlu mengadaptasi respons *counter-terrorism* dan *counter-radicalisation* dengan strategi yang fokus pada *soft approach*, baik melalui media, pendidikan, budaya, dan agama dengan menyoroti realitas ISIS. Tidak hanya itu, juga diperlukan strategi *holistic counter-terrorism*, yaitu selain dengan *soft approach*, juga mengembangkan kohesivitas kerja sama warga masyarakat dengan aparat keamanan untuk memonitor perkembangan pendukung atau simpatisan ISIS. Selain itu, dinamika dan keunikan sosial, budaya, ekonomi, dan religiusitas yang dimiliki tidak boleh diabaikan dalam strategi *counter-terrorism*. *Ibid.*

Lebih lanjut, menurut Njoto-Feillard,⁵³ awalnya pemerintah Indonesia lambat dalam merespons perkembangan ISIS.⁵⁴ Baru pada 4 Agustus 2014, pemerintah menyatakan sikapnya bahwa ISIS dilarang. Setelah menyatakan sikap, pemerintah Indonesia memperketat keamanan, menggandeng ulama dan pemuka agama untuk meyakinkan masyarakat agar tidak ikut atau mendukung ISIS. Inisiatif untuk *counter* ideologi ISIS juga berasal dari elemen organisasi Muslim, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Akan tetapi, menurut Killackey,⁵⁵ respons Indonesia terhadap ISIS tidak begitu tegas. Killackey menyebutnya dengan *tepid*, hangat-hangat kuku. Hal itu dipertegas juga oleh Berger⁵⁶ bahwa pada awalnya pemerintah Indonesia abai

⁵³ Gwenaël Njoto-Feillard, "Responses to the Challenges of ISIS Indonesia," *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Perspective* #51, 7 Oktober 2014.

⁵⁴ Pernyataan tersebut didasarkan fakta bahwa selama paruh pertama 2014, ISIS telah berhasil menduduki beberapa masjid dan mengajak warga Indonesia untuk melakukan jihad ke Timor Tengah guna mendukung berdirinya kekhalifahan Islam. Pertengahan 2014, sejumlah orang melakukan demonstrasi untuk mendukung ISIS di Bundaran Hotel Indonesia, namun baik media maupun pemerintah tidak memberikan perhatian serius. Kemudian, pada 18 Juli 2014, pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) Abu Bakar Ba'asyir melakukan baiat terhadap beberapa militan di penjara Nusakambangan. Selanjutnya, beredar video seruan jihad dan pada Agustus muncul video lain yang menunjukkan adanya baiat sejumlah orang mendukung ISIS di hotel UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat *ibid*.

Terkait baiat di LP Nusakambangan, Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham Handoyo Sudrajat membenarkan bahwa ada 24 narapidana yang berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Hal itu didukung dengan beredarnya foto Abu Bakar Ba'asyir yang duduk diapit para pria yang mengenakan pakaian putih. Beberapa menutupi wajah dengan sorban dan mengacungkan jari telunjuk. Salah satunya membentangkan bendera ISIS berwarna hitam. Namun, lanjut Handoyo, informasinya bahwa awalnya Ba'asyir enggan melakukan baiat. "Informasinya, mereka bersama-sama. Jadi Ba'asyir sempat tidak mau, tapi didorong-dorong," kata Handoyo. Hal senada disampaikan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah, Hermawan Yudianto bahwa "Kita klarifikasi ke Ba'asyir menanyakan itu. Dijawab saya (Ba'asyir) tidak setuju tapi ditekan terus dengan yang ingin bergabung dengan ISIS. Akhirnya dia (Ba'asyir) mau juga membaiat." Baca Aisha Shaidra, "Dirjen Pemasarakatan Benarkan Foto Baiat Ba'asyir di LP," *Tempo*, 4 Agustus 2014, [online] <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/04/078597152/Dirjen-Pemasarakatan-Benarkan-Foto-Baiat-Baasyir-di-LP> (diakses pada 17/02/2014); A. Z. Muttaqin, "Ustadz Ba'asyir Melakukan Baiat Atas Desakan Sejumlah Napi Pendukung ISIS," *Arrahmah*, 5 Agustus 2014, [online] <http://www.arahmah.com/news/2014/08/05/ustadz-baasyir-melakukan-baiat-atas-desakan-sejumlah-napi-pendukung-isis.html#sthash.Y20wG8Oc.dpuf> (diakses pada 17/02/2014).

⁵⁵ Maren Killackey, "Indonesia's Tepid Response to ISIS," 18 Agustus 2014, [online] <http://cpreview.org/2014/09/indonesias-tepid-response-to-isis/> (diakses pada 11/02/2015).

⁵⁶ Dominic Berger, "Why Indonesia Banned ISIS," [online] <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/10/01/why-indonesia-banned-isis/> (diakses pada 11/02/2015).

terhadap isu ISIS.⁵⁷ Bahkan, menurut Berger, serangkaian respons pemerintah justru kontradiktif. Buktinya, pemerintah tidak melarang beberapa organisasi Islamis yang secara doktrin ideologis dan cita-cita hampir sama dengan ISIS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya. Visi HTI yang bertujuan mendirikan *khilafah Islamiyah* tidak dipandang sebagai ancaman ideologis bagi Indonesia. Berbeda dengan ISIS, yang secara struktur organisasional tidak ada di Indonesia, namun mendapat respons tegas dari pemerintah.⁵⁸

Senada dengan Berger, menurut Arianti,⁵⁹ respons pemerintah melarang ISIS menjadi dilematis. Meskipun ISIS secara tegas dilarang, namun negara tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pendukung ISIS kecuali jika mereka terbukti melakukan tindakan dan aksi terorisme. Menurutnya, hal ini kemudian menjadi perkara serius dalam kekosongan usaha *counter terrorism* di Indonesia. Karena itu, menurut Arianti, pemerintah perlu mengajukan aturan hukum kepada parlemen sebagai usaha penguatan *anti-terrorism legal regime*.

Pendapat Berger dan Arianti di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Jones.⁶⁰ Jones menilai bahwa sikap pemerintah yang dengan tegas melarang ISIS sejak Agustus 2014 tidak dibarengi dengan hukum. Tidak ada hukum atau peraturan lain, sehingga larangan terhadap ISIS lebih merupakan instruksi atau perintah semata tanpa *legal standing*. Padahal, menurutnya, ancaman terorisme di

⁵⁷ Catatan kritis peneliti terhadap pandangan Njoto-Feillard, Killackey, dan Berger adalah bisa jadi lambannya respons pemerintah Indonesia bukan karena abai, melainkan merupakan bagian dari operasi kontra-intelijen agar kemudian dapat dengan mudah melihat pihak-pihak terkait yang mendukung ISIS.

⁵⁸ Catatan kritis peneliti terkait pendapat Berger mengenai HTI adalah karena HTI melakukan tindakan dan aksinya secara moderat (tidak radikal) sehingga eksistensinya tidak dilarang. Pemerintah melarang suatu gerakan atau organisasi bukan berdasarkan pada ideologinya tetapi pada tindakannya. Jika tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pidana, barulah organisasi atau gerakan itu dilarang. Sebab, larangan terhadap gerakan atau organisasi berdasarkan afiliasi ideologinya melanggar kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan berpendapat yang telah diadopsi pemerintah pasca Reformasi. Hal ini berbeda dengan era Orde Baru yang memiliki UU Subversi yang dapat digunakan untuk menindas kelompok atau organisasi seperti HTI.

⁵⁹ V. Arianti, —Southeast Asia: Indonesia,” *Counter Terroris Trends and Analysis*, Volume 7, Issue 1, January/February 2015 (Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, 2015), hal. 9-12.

⁶⁰ Sidney Jones, —Counter-Terrorism and the Rise of ISIS in 2014,” *Tempo* 5 Januari 2015, [online] <http://www.understandingconflict.org/conflict/read/33/Counter-Terrorism-and-the-Rise-of-ISIS-in-2014> (diakses pada 12/02/2015).

Indonesia tidak hanya berasal dari luar tetapi juga dari dalam negeri. Karena itu, banyaknya warga negara Indonesia yang diidentifikasi melakukan jihad ke Syria dan bergabung dengan ISIS serta eksistensi jaringan teroris di dalam negeri menunjukkan bahwa upaya *counter-radicalization* yang dilakukan oleh pemerintah cenderung lemah serta target program deradikalisasi cenderung tidak tercapai. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo sejauh ini belum memiliki strategi *counterterrorism* yang jelas.

Serangkaian literatur di atas menunjukkan bahwa penelitian atau kajian mengenai respons pemerintah lokal (*local government*) terhadap ancaman ISIS belum ditemukan. Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian sebelumnya seperti dikemukakan di atas lebih terfokus pada respons pemerintah Indonesia (respons negara). Oleh karena itu, terdapat celah atau ruang kosong yang menjadikan penelitian ini signifikan untuk menganalisis respons pemerintah lokal dalam menyikapi ancaman ISIS. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, respons pemerintah lokal menjadi penting karena persemaian gerakan radikalisme dan ekstremisme, khususnya ISIS, berlangsung di daerah sehingga pemerintah di level daerah memiliki peran dan posisi yang penting dalam upaya membendung perkembangan ideologi dan gerakan ISIS.

5. Kerangka Pemikiran

Penyebaran ideologi dan eksistensi ISIS di level lokal tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fitur globalisasi.⁶¹ Fitur itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh ISIS untuk melakukan propaganda dan menyebarkan narasi jihad. Hal tersebut karena *–ommunication is the heart of terrorism.*⁶² Menurut Chandler dan Gunaratna, tidak ada pengecualian bahwa semua kelompok teroris, termasuk ISIS

⁶¹ Menurut Chandler dan Gunaratna, perangkat-perangkat komunikasi modern telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dan sangat penting bagi kelompok teroris. Bahkan sekalipun kelompok teroris itu memiliki ideologi puritan, mereka tetap menggunakan instrumen-instrumen modern dari fitur-fitur globalisasi untuk mengembangkan dan mencapai misinya. Lihat Michael Chandler dan Rohan Gunaratna, *Countering Terrorism: Can We Meet the Threat of Global Violence?* (London: Reaktion Books, 2007), hal. 178.

⁶² Philip Seib dan Dana M. Janbek, *Global Terrorism and New Media: The Post-Al Qaeda Generation* (New York: Routledge, 2011), hal. 1.

menggunakan internet.⁶³ Hal yang sama dikatakan Barret, bahwa internet dan media sosial merupakan sarana efektif dalam menyebarkan ideologi yang sekaligus memainkan peran penting dalam rekrutmen dan pendanaan ISIS.⁶⁴

Oleh karena ancaman ISIS lebih bersifat ideologis yang disebarkan melalui propaganda via internet dan media sosial (non-fisik) serta ancamannya yang bersifat global, maka upaya *counter-ISIS* perlu direspons secara komprehensif. Menurut Martin, perlu mengintegrasikan beragam cara dan upaya sebagai usaha *counterterrorism* karena, *“no single counterterrorist measure can be applied in the same manner to every terrorist environment.”*⁶⁵ Untuk itu, menurut Forest, upaya *counterterrorism* perlu mengintegrasikan antara pendekatan *hard power* dan *soft power*.⁶⁶ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *hard power*

⁶³ *“It became the main platform for the ideologues of violent jihad and their facilitators to recruit, politicize, radicalize and mobilize new generations of terrorists and extremists.”* Chandler dan Gunaratna, *Countering Terrorism*, hal. 179.

⁶⁴ Richard Barret, *“Foreign Fighters in Syria,” The Soufan Group (TSG) June 2014; 1-33*, hal. 7. Dalam bahasa Kaldor, kemunculan kelompok atau gerakan seperti ISIS merupakan bentuk *new wars*, dengan taktik yang digunakannya adalah menebarkan ancaman dan kebencian berdasarkan konstruksi ideologis yang dimilikinya. Ideologi dan narasi kebencian tersebut kemudian disebarkan untuk menarik dukungan dan simpati dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Newman dan Lynch, ideologi adalah hal yang penting bagi suatu kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain. Karena itu, menurut Hussain dan Slatman, upaya *countering* terhadap kelompok seperti ISIS tidak dapat berjalan efektif tanpa memahami ideologi yang dimilikinya. Baca Mary Kaldor, *“Cosmopolitanism and Organised Violence,”* (2002) paper for Conference on *‘Conceiving Cosmopolitanism’*, Warwick, 27-29 April 2000, hal. 1-10; Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era* (Cambridge: Polity Press, 2006), hal. 72-75 dan 80-82; Newman J. R. dan Lynch, M. J., *“From Freud to Terrorism: The Ideology of Vegence,” Contemporary Crises*, 11, 1987: 223-242, dalam Ihekwoaba D. Onwudiwe, *The Globalization of Terrorism* (Hampshire: Ashgate Publishing Lt., 2002), hal. 42; Hussain dan Saltman, *Jihad Tranding*, hal. 108.

⁶⁵ Gus Martin, *“Counterterrorist Options in the New Era,”* dalam Gus Martin (ed.), *The New Era of Terrorism: Selected Readings* (California: Sage Publications, 2004), hal. 323.

⁶⁶ James J. F. Forest, *“Strategic and Tactical Consideration: An Introduction,”* dalam James J. F. Forest (ed.), *Countering Terrorism and Insurgency in the 21th Century: International Perspective*. Volume 1: Strategic and Tactical Consideration (London: Praeger Security International, 2007), hal. 6.

Lebih lanjut, dalam usaha menghadapi ancaman terorisme terdapat dua term tindakan, yakni *anti-terrorism* (*defensive measures*) and *counter-terrorism* (*offensive measures*). *Anti-terrorism* lebih merupakan upaya preventif untuk mencegah ekspansi ideologis dan serangan aksi terorisme sehingga lebih bersifat pasif. Sementara, *counter-terrorism* merupakan upaya proaktif melalui tindakan *offensive* terhadap organisasi teroris, jaringan, sponsor, maupun individu sehingga *counter-terrorism* mencakup spektrum respons yang luas. Thomas R. Mockaitis, *The “New” Terrorism: Myth and Realities* (London: Praeger Security International, 2007), hal. 91; Alan O’Day, *“Introduction,”* dalam Alan O’Day (ed.), *The International Library of Essays in Terrorism: War on Terrorism* (Burlington: Ashgate Publishing, 2004), hal. xv

adalah pendekatan yang represif, sementara *soft power* merupakan pendekatan yang persuasif.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan represif yang dilakukan pemerintah lokal adalah dengan melibatkan aparat keamanan, yakni militer dan kepolisian dalam merespons ancaman ISIS melalui penangkapan, pengawasan terhadap lokasi dan target tertentu, serta penegakan aturan hukum. Sementara itu, pendekatan persuasif adalah dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholders*.

Selain itu, pilihan respons pemerintah sebagai bentuk *counterterrorism* memerlukan pendekatan *security governance*.⁶⁷ Menurut Daase dan Friesendorf, konsep *security governance* menggambarkan bentuk baru dari kebijakan keamanan yang berbeda dari pendekatan tradisional (*traditional approach*). Jika kebijakan keamanan tradisional digunakan sebagai domain negara dan dengan tujuan yang militeristik, maka *security governance* dilakukan oleh *multiple actors* dari berbagai jenis dan level untuk menciptakan keamanan dalam konteks dan dimensi yang lebih luas.⁶⁸

Untuk itu, karena pendekatan *security governance* mencakup *multiple and multilevel actors*, maka model *governance* tersebut menjadi relevan pula di level *local government*, yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini sebagai panduan untuk memahami bagaimana pemerintah lokal merespons isu dan

⁶⁷ Untuk memahami konsep *security governance*, Krahmenn memilahnya ke dalam dua komponen term, yakni *security* dan *governance*. Pertama, menurutnya, *security* perlu dipahami dalam konsep yang lebih mendalam dan luas, yakni mulai dari level negara hingga masyarakat dan individu, dari dimensi militer ke aspek non-militer. Sementara itu, *governance* merujuk pada struktur dan proses di mana aktor publik dan aktor privat mengkoordinasikan kebutuhan dan kepentingannya dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan di tengah tidak adanya otoritas tunggal yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat. Selain itu, Krahmenn membedakan antara *government* dan *governance*. *Government* merujuk pada sentralisasi (*centralization*), di mana *decision-making* dan implementasinya terpusat pada pemerintah sehingga bersifat hierarkis. Sementara *governance* merujuk pada penyebaran atau pembagian (*fragmentation*) otoritas antara aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (*stakeholders* terkait) di berbagai tingkatan. Lihat Elke Krahmenn, "Conceptualizing Security Governance," *Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association*, Vol. 38(1), 2003: 5-26, hal. 9-13.

⁶⁸ Christopher Daase dan Cornelius Friesendorf, "Security Governance and the Problem of Unintended Consequences," dalam Christopher Daase and Cornelius Friesendorf (eds.), *Rethinking Security Governance: The Problem of Unintended Consequences* (New York: Routledge, 2010), hal. 1.

ancaman ISIS. Dalam *security governance*, terdapat tiga model yang dapat dilakukan, yakni pendekatan sentralisasi (*centralized approach*), pendekatan desentralisasi (*decentralized approach*), dan pendekatan campuran (*hybrid approach*).⁶⁹

Pertama, pendekatan sentralisasi merujuk pada pemusatan wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan pada pemerintah pusat (dalam konteks *local government* yakni pemerintah kabupaten/kota). Kedua, pendekatan desentralisasi merujuk pada pendelegasian wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan kepada para *stakeholders* terkait (yakni organisasi, badan, atau institusi di level daerah) untuk menentukan sendiri kebijakan dan prosedur yang perlu dilakukan. Ketiga, dalam pendekatan *hybrid*, wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan didistribusikan antara pemerintah (aktor publik) dan non-pemerintah (aktor privat). Artinya, terjadi *share* kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah dengan organisasi, badan, dan institusi terkait tentang tindakan yang perlu dilakukan. Pemerintah menetapkan kebijakan, prosedur, dan proses untuk memastikan keterlibatan seluruh *stakeholders* melalui penyediaan struktur dan infrastruktur. Sementara pada saat yang sama, para *stakeholders* aktor privat menjamin keterlibatannya sesuai dengan proporsi yang dimiliki.

Lebih lanjut, implementasi *security governance* menuntut perlunya *local governance*. Jika *local government* merujuk pada institusi atau entitas spesifik dalam sebuah wilayah geografis yang relatif kecil sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan pelayanan, maka *local governance* merupakan konsep yang luas dan didefinisikan sebagai formulasi dan pelaksanaan aksi kolektif pada tingkat lokal.⁷⁰ Jika *local government* merujuk pada struktur institusi formal dan proses pembuatan kebijakan di level lokal, maka *local governance* merupakan bentuk upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah

⁶⁹ National Institute of Standards and Technology, "Managing Information Security Risk: Organization, Mission, and Information System View," *NIST Special Publication 800-39*, March 2011, hal. 80.

⁷⁰ Anwar Shah dan Sana Shah, "The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments," dalam Anwar Shah (ed.), *Local Governance in Developing Countries* (Washington DC.: The World Bank, 2006), hal. 1.

(aktor publik) dan non-pemerintah (aktor privat) untuk merespons kebutuhan masyarakat pada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan usaha *local government* sendiri.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, *local governance* dilihat sebagai koordinasi vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh pemerintah lokal sebagai usaha penguatan upaya *counter-ISIS*. Dalam kaitannya dengan itu, mekanisme koordinasi dapat bersifat *hierarchical system* dan *network system*.⁷¹ *Hierarchical* atau *regulatory type* bersifat *top-down*, dengan koordinasi berdasarkan pada otoritas pemerintah untuk memaksakan aturan dan prosedur kepada aktor-aktor lain. Sementara itu, *network coordination* atau *integrated approach* dengan melibatkan *local multi-agency*. *Local multi-agency* mencakup pengembangan kapasitas otoritas lokal untuk mengorganisasikan hubungan dan *strategic partnerships* dengan berbagai institusi atau aktor lokal, baik sektor publik maupun sektor privat.⁷²

Lebih lanjut, respons pemerintah lokal terhadap ISIS tersebut perlu dilihat dalam konteks respons negara. Jika ISIS dipandang sebagai ancaman bersama bagi suatu negara maka meresponsnya memerlukan *Whole-of-Government Approach* (WGA) dalam negara itu. WGA –denotes public services agencies working across portofolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal or informal. They can focus on policy development, program management, and service delivery.⁷³ Dalam konteks ini, WGA menunjukkan perlunya sinergitas pemerintah di semua level, baik lokal/daerah, provinsi, dan pusat dalam merespons isu ISIS secara bersama-sama.

Selain itu, karena ISIS merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional maka respons pemerintah lokal dan negara (Indonesia)

⁷¹ Franco Mantino, "Typologies of Governance Models," *Assessing the Impact of Rural Development Policies*, National Institute of Agricultural Economics, Rome, Italy, 2007, hal. 6.

⁷² Institute for Strategic Dialogue, "Strengthening Government Partnership to Build Resilience: The Challenge of Foreign Fighters," *Policy Planners' Network*, 2014, hal. 7.

⁷³ Tom Christensen dan Per Legreid, "The Whole-of-Government Approach – Regulation, Performance, and Public-Sector Reform," *Stein Rokkan Centre for Social Studies*, UNIFOB AS, Working Paper 6, August 2006, hal. 9.

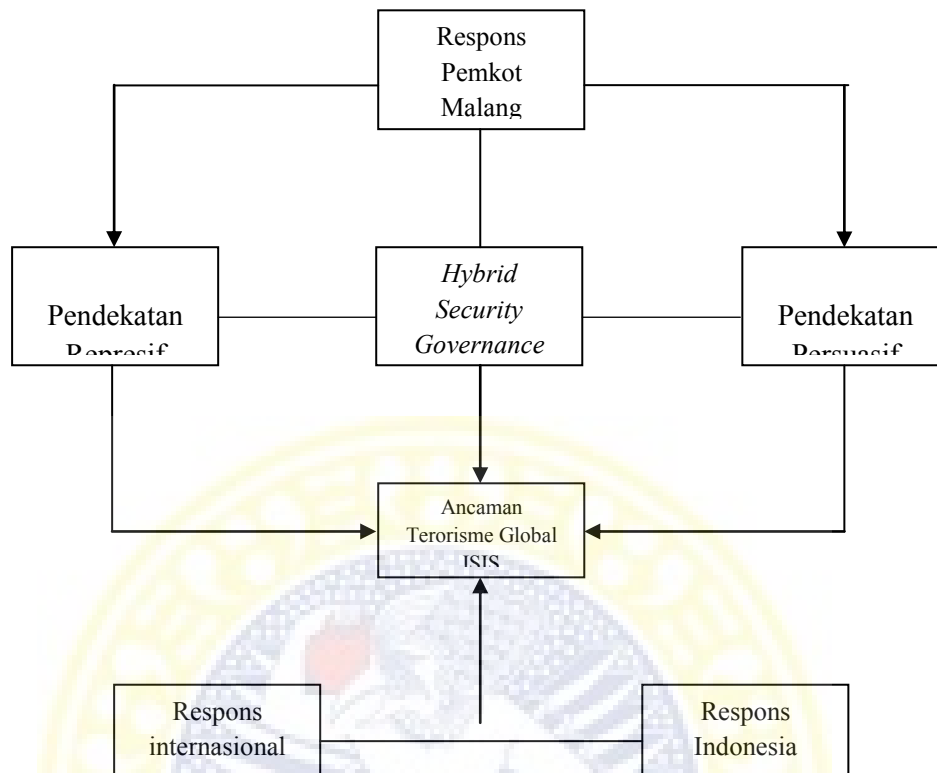
juga perlu dilihat dalam konteks makro, yakni dalam konteks level internasional. Sebab, isu-isu global menuntut perlunya entitas masyarakat internasional *goes hand by hand* dalam menyikapinya, di mana upaya meresponsnya membutuhkan *comprehensive approach*. Menurut Rintakoski dan Autti, *comprehensive approach* merupakan ~~the~~ efforts of the international community as a whole ~~both~~ international organisations and national governments endeavours to improve the coherence of their response to crises and conflicts.”⁷⁴

Comprehensive approach dibutuhkan karena upaya menghadapi dan menyelesaikan suatu isu tertentu mensyaratkan perlunya hubungan sinergis antara aktor internal dan eksternal, yang mencakup pemerintahan suatu negara, *civil society*, aktor privat, dan organisasi atau institusi internasional.⁷⁵ Hal itu karena isu dan masalah tertentu, termasuk ISIS, tidak dapat diselesaikan sendiri hanya oleh satu negara atau organisasi internasional sehingga diperlukan upaya multilateral dengan mengkombinasikan cara dan instrumen sipil (*soft*) dan militer (*hard*). Dengan demikian, *comprehensive approach* membutuhkan sinergitas secara vertikal (organisasi internasional dengan negara, pemerintah negara dengan aktor domestik) dan horizontal (organisasi internasional dengan organisasi internasional, negara dengan negara, negara dan aktor privat).⁷⁶ Skema kerangka pemikiran digambarkan pada bagan di bawah.

⁷⁴ Kristiina Rintokoski dan Mikko Autti, *Comprehensive Approach: Trends, Challenges and Possibilities for Cooperation in Crisis Prevention and Management*, Seminar Publication on Comprehensive Approach Seminar 17 June 2008 Helsinki (Helsinki, Minister of Defence, 2008), hal. 10.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 11.

⁷⁶ Margriet Drent, ~~The~~ EU’s Comprehensive Approach to Security: A Culture of Co-ordination?,” *Studia Diplomatica* 2011, LXIV-2, hal. 4.



Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

6. Thesis Statements

Pemerintah lokal, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang, merespons ancaman terorisme global ISIS dengan, pertama, mengintegrasikan pendekatan represif dan persuasif. Pendekatan represif dengan melibatkan aparat keamanan dalam bentuk penangkapan serta upaya penegakan aturan hukum. Pendekatan persuasif adalah dengan melakukan sosialisasi, dialog, penyampaian informasi, dan lainnya kepada masyarakat yang melibatkan berbagai *stakeholders* untuk membendung penyebaran paham dan perkembangan jaringan ISIS.

Kedua, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah lokal mempraktikkan pendekatan *hybrid security governance* yang melibatkan kewenangan dan tanggung jawab unsur pemerintah (aktor publik) dan non-pemerintah (aktor privat). *Hybrid security governance* tersebut didukung dengan mekanisme *network coordination* dalam kerangka *local governance* yang mencakup

keterlibatan *multi-agency* dari berbagai sektor sebagai bentuk respons terhadap isu dan ancaman ISIS di level lokal.

Ketiga, respons pemerintah lokal tersebut sinergis dengan respons pemerintah di level yang lebih tinggi sebagai bentuk *whole-of-government approach* karena ISIS dipandang sebagai ancaman nasional sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh level pemerintah. Selain itu, respons tersebut merupakan bagian dari *comprehensive approach* yang melibatkan entitas masyarakat internasional dalam menghadapi ISIS sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari aspek metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif, desain penelitian bersifat fleksibel dan berkembang dalam proses penelitian. Adapun logika penelitian ini bersifat induktif, yakni peneliti memfokuskan perhatian pada data di lapangan. Karenanya, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji teori atau hipotesis di lapangan, melainkan teori, proposisi, atau hipotesis akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan.⁷⁷

Adapun dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada.⁷⁸ Desain penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat respons pemerintah lokal terkait isu dan ancaman ISIS kemudian berusaha untuk menggambarannya secara sistematis, mengungkapkan fakta-fakta, menemukan pola, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan teori atau konsep dalam tataran akademis.

⁷⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hal. 24.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 68.

b. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan antara pengumpulan data secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pengumpulan data secara langsung, yaitu melalui penelitian lapangan, dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka (*open-ended interview*).⁷⁹ Disebut demikian karena peneliti tidak memiliki atau menyusun daftar pertanyaan secara baku dan sistematis. Pertanyaan yang diajukan bersifat luwes, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jenis data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disebut sebagai data primer.

Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelaahan sumber-sumber tertulis, melalui buku, laporan penelitian, surat kabar, sumber internet, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara agar dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Jenis data yang diperoleh melalui penelaahan sumber tertulis tersebut disebut sebagai data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan antara April hingga Mei 2015 di Kota Malang. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang mampu memberikan data dan informasi terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini, karena keterlibatannya baik secara individual maupun institusional.⁸⁰ Narasumber tersebut adalah:

⁷⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 180.

⁸⁰ Perlu ditegaskan bahwa term pemerintah lokal (*local government*) dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai pemerintahan di level daerah kabupaten/kota (Kota Malang) bersama instrumen yang dimiliki untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya dalam hal ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Instrumen yang dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi instansi-instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta pemerintahan di level kecamatan dan kelurahan. Selain itu, pemerintah daerah juga membentuk jalur koordinasi dan memiliki hubungan fungsional dengan "instansi samping", yakni Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, dalam level pemerintahan daerah terdapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, seperti persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan permasalahan konflik, stabilitas keamanan lokal, dan sebagainya. Forkompida terdiri dari bupati/walikota (sebagai ketua), pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan TNI di daerah. Oleh karena itu, sekalipun

1. Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Tony Noermawan.⁸¹
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Malang, Muhammad Nur Widiyanto.⁸²
3. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Baladhika Jaya Kota Malang, Arya Yudha Setiawan.⁸³
4. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang, Imam Solikin.⁸⁴ Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada intelijen Sat Intelkam Polresta Malang.⁸⁵

merupakan instrumen negara (pemerintah pusat), pihak kepolisian dan TNI dalam penelitian ini menjadi objek penelitian karena merupakan mitra, memiliki jalur koordinasi, dan hubungan fungsional dengan pemerintah lokal. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkruen Pasal 12 Ayat 1 Poin e, Bab IV Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25 Ayat 1 Poin a-g, dan Bagian Kelima Forkompida Pasal 26 Ayat 1-3.

⁸¹ Wawancara dilakukan pada 14 dan 16 April serta 15 Mei 2015 di Kantor Bakesbangpol Jalan A. Yani 98 Kota Malang. Narasumber dipilih karena berdasarkan informasi dan masukan dari pihak Bakesbangpol, Bidang Integrasi Bangsa menjadi penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan Bakesbangpol terkait upaya penanggulangan paham dan gerakan ISIS. Selain itu, sebelum wawancara dilakukan terjadi mutasi pada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Bakesbangpol. Akibatnya, Kepala Bakesbangpol dijabat oleh pejabat baru (yakni Bambang Suharijadi) dan saat wawancara dilakukan yang bersangkutan terhitung baru satu hari menjabat sehingga dipandang tidak atau belum memahami persoalan (pejabat lama Wahyu Setianto dimutasi menjadi Kepala Dinas Pasar). Untuk itu, dalam kapasitasnya sebagai Kabid Integrasi Bangsa sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya, narasumber dipandang memiliki informasi dan memahami langkah-langkah serta respons Pemkot Malang terkait ISIS karena yang bersangkutan bersentuhan langsung dengan persoalan.

⁸² Wawancara dilakukan pada 14 April 2015 di Balai kota Malang Jalang Tugu 1 Kota Malang. Pemilihan narasumber didasarkan pada penjelasan pihak Kantor Walikota Malang bahwa Bakesbangpol menjadi *leading sector* Pemkot Malang dalam merespons ISIS. Sementara, Kantor Walikota memiliki informasi terbatas dan tidak ada bagian khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal antisipasi paham radikal ISIS. Dalam jajaran Pemkot, Bakesbangpol diberi kewenangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam merespons hal tersebut. Namun, setelah meminta masukan dari pihak Kantor Walikota, peneliti lebih diarahkan ke Bagian Humas. Alasannya, karena Bagian Humas menjadi sumber dan pusat dari informasi dan berita yang masuk dan keluar atas nama Pemkot Malang sehingga dipandang mampu untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait respons Pemkot Malang terhadap isu dan ancaman ISIS. Peneliti sebenarnya telah berupaya untuk melakukan wawancara kepada Walikota Malang Moch. Anton, namun karena aktivitas dan kesibukan yang bersangkutan sehingga wawancara tidak memungkinkan.

⁸³ Wawancara dilakukan pada 16 April 2015 di Kodim 0833 Baladhika Jaya Jalan Kahuripan 6 Kota Malang.

⁸⁴ Wawancara dilakukan pada 5 Mei 2015 di Polresta Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto 19 Kota Malang. Wawancara dilakukan kepada narasumber karena berdasarkan disposisi dari Kepala Polresta Malang, Singamata, Sat Intelkam diberi wewenang untuk memberikan data dan informasi (yang sifatnya bukan rahasia) kepada peneliti sebab Sat Intelkam merupakan bagian yang bersentuhan langsung dalam pengumpulan informasi mengenai ISIS dan pengawasan pihak-pihak yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan ISIS.

5. Ketua I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, Noor Chozin Askandar.⁸⁶
6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, Sudjoko Santoso.⁸⁷
7. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Amsiyono.⁸⁸
8. Ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, Isroqun Najah.⁸⁹
9. Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Etta Mamang Sangadji.⁹⁰
10. Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Masykuri Bakri.⁹¹
11. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM), Suparlan Al Hakim.⁹²

⁸⁵ Wawancara dilakukan pada 17 April dan 5 Mei 2015 di Polresta Malang. Untuk keamanan dan keselamatan narasumber sebagai intelijen dan atas permintaan yang bersangkutan, nama narasumber tidak boleh ditulis dan dicantumkan. Sehingga, selanjutnya, data dan informasi yang mengacu dan bersumber dari narasumber hanya ditulis "—intelijen" (tanpa nama). Narasumber diberi wewenang dari Kasat Intelkam Imam Solikin untuk memberikan data dan informasi karena yang bersangkutan merupakan intelijen yang bersentuhan langsung dalam mengumpulkan informasi tentang ISIS di lapangan.

⁸⁶ Wawancara dilakukan pada 21 April 2015 di Kantor Yayasan Universitas Islam Malang Jalan MT. Haryono 193 Kota Malang. Berdasarkan disposisi dari Ketua MUI Kota Malang Baidlowi Muslich, peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara kepada narasumber karena dipandang lebih memahami persoalan dan informasi terkait ISIS.

⁸⁷ Wawancara dilakukan pada 27 April 2015 di kediaman narasumber, Jalan Batu Permata, Tlogomas, Kota Malang.

⁸⁸ Wawancara dilakukan pada 28 April 2015 di Kantor Kemenag Jalan R. Panji Suroso 2 Kota Malang. Berdasarkan disposisi dari Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Imron, peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara kepada Kasi Bimas Islam karena terkait informasi dan respons terhadap ISIS menjadi tugas yang bersangkutan.

⁸⁹ Wawancara dilakukan pada 29 April 2015 di Kantor PCNU Jalan KH. Hasyim Asy'ari 21 Kota Malang.

⁹⁰ Wawancara dilakukan pada 18 Mei 2015 di Kantor PDM Jalan Gajayana 26B Kota Malang. Berdasarkan pengajuan permohonan wawancara, peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara kepada Ketua Umum PDM Kota Malang Rif'an Masykur. Akan tetapi, setelah dua kali menghubungi yang bersangkutan, tampak tidak ada respons karena yang bersangkutan sedang sakit. Sehingga kemudian, Wakil Ketua PDM Maryanto mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara kepada Sekretaris Umum yang dipandang dapat mewakili pandangan PDM Kota Malang.

⁹¹ Wawancara dilakukan pada 30 April 2015 di Gedung Rektorat Unisma Jalan MT. Haryono 193 Kota Malang.

⁹² Wawancara dilakukan pada 7 Mei 2015 di FISIP UM Jalan Semarang 5 Kota Malang. Narasumber akhirnya dipilih setelah melalui proses birokrasi di UM. Pengajuan permohonan wawancara peneliti didisposisi oleh Wakil Rektor II Wahjoedi kepada Kepala Sub-Bagian Sarana

12. Wakil Rektor I UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. M. Zainuddin.⁹³
13. Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang, Hilmy Mochtar.⁹⁴
14. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir Effendy.⁹⁵

Selain narasumber yang telah diuraikan di atas, peneliti juga memperoleh beberapa data dan informasi dari beberapa pihak. Data dan informasi tersebut juga digunakan dalam laporan penelitian ini karena kapasitas yang bersangkutan sebagai aparat Pemkot Malang dan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian. Informan tersebut berasal dari jajaran Bakesbangpol Kota Malang, yakni Kunto Widodo (Sub. Bidang Pembauran Bidang Integrasi Bangsa), I Gusti Ngurah Gede Kabayartha (Sub. Bidang Pengawasan Kebangsaan Bidang Integrasi Bangsa), Ismu Sukamto (Sub. Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Daerah), Suhartini (Sub. Bagian Penyusunan Program). Selain itu, juga dari Balikpapan Malang, yakni Erik Maulana (Staf Pemberitaan Bagian Humas). Informasi lain juga berasal dari Sugiyono (Komandan Komando Resort Militer Sukun), Rino (Camat Klojen), Sohib (Kepala Unit Intelkam Kepolisian Sektor Klojen), serta M. Nursalim (Sekretaris FKUB Kota Malang).⁹⁶

Pendidikan, Sugiono. Selanjutnya, Bagian Sarana dan Akademik memberikan disposisi kepada Dekan FIS Hariyono untuk memberikan data dan informasi karena dipandang lebih memiliki kapasitas terkait tema penelitian. Namun, Dekan FIS mengarahkan peneliti kepada narasumber dengan pertimbangan dipandang lebih cakap untuk mengenai tema penelitian.

⁹³ Wawancara dilakukan pada 12 Mei 2015 di Gedung Rektorat UIN Jalan Gajayana 50 Malang. Pengajuan permohonan wawancara yang diajukan kepada Rektor UIN Malang Mudjia Rahardjo didisposisi ke Wakil Rektor I. Pertimbangannya karena saat itu Rektor memiliki agenda yang padat dan WR I dipandang lebih memiliki kapasitas untuk memberikan data dan informasi karena tema penelitian memiliki keterkaitan dengan tugas dan tanggung jawab narasumber.

⁹⁴ Wawancara dilakukan pada 13 Mei 2015 di Gedung FISIP UB Jalan Veteran Kota Malang. Narasumber akhirnya dipilih setelah melalui proses birokrasi di UB. Pengajuan permohonan wawancara peneliti kepada Rektor UB Mohammad Bisri didisposisi kepada Wakil Rektor I Kusmartono. Wakil Rektor I kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Biro Akademik. Selanjutnya didisposisi ke Kepala Bagian Akademik. Kasubag Akademik kemudian mengajukan ke Wakil Rektor III Arief Prajitno dengan alasan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan bersentuhan dengan dunia kemahasiswaan. Namun, Wakil Rektor III melanjutkan disposisi ke FISIP. Pada saat itu, Dekan FISIP Darsono Wisadirana tengah melakukan ibadah umroh sehingga peneliti mengajukan permohonan wawancara kepada Pembantu Dekan III FISIP, Akhmad Muwafik Saleh. PD III kemudian mengarahkan peneliti kepada narasumber dengan alasan dipandang lebih memahami persoalan dan informasi.

⁹⁵ Wawancara dilakukan pada 3 Juni 2015 di Gedung Rektorat UMM Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang.

⁹⁶ Informasi dari empat nama yang disebut terakhir diperoleh dalam acara Sosialisasi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kelurahan: Sosialisasi Antisipasi Gerakan, Aksi dan

c. Batasan Penelitian

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah Juli 2014 hingga Mei 2015. Juli 2014 merupakan awal di mana ISIS dipandang sebagai ancaman seiring dengan beredarnya video seruan jihad ISIS dan adanya deklarasi dukungan terhadap ISIS di Malang. Sementara itu, hingga Mei 2015, pemerintah dan para *stakeholders* di Kota Malang masih terus meningkatkan kewaspadaan terhadap isu dan ancaman ISIS terlebih setelah anggota ISIS ditangkap di Kota Malang pada akhir Maret 2015. Adapun batasan materi difokuskan pada serangkaian respons, sikap, tindakan, upaya, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Malang dan para *stakeholders*, tidak mencakup Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagaimana telah ditegaskan di bagian awal.

d. Teknik Analisis Data

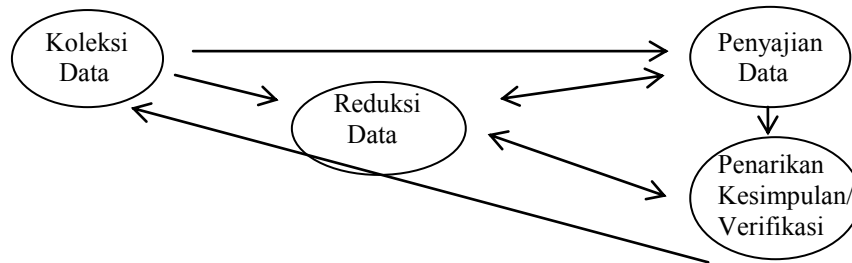
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data melibatkan empat komponen, yaitu *data collection* (koleksi data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).⁹⁷ Pertama-tama, data dicari dan dikoleksi dari berbagai sumber, baik melalui wawancara maupun sumber sekunder. Data tersebut selanjutnya direduksi agar lebih fokus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Setelah reduksi data, data dikumpulkan dan kemungkinan direduksi kembali. Hal tersebut karena ada data yang dapat langsung digunakan dan ada yang perlu dilakukan pereduksian kembali.⁹⁸ Selanjutnya, data-data disajikan dalam penelitian, kemudian bisa ditarik kesimpulan untuk dapat

Pengembangan Organisasi Radikal/ISIS di Daerah pada 17 April 2015 di Aula Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen.

⁹⁷ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16.

⁹⁸ Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Karena itu, reduksi data merupakan hal yang tidak terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan. *Ibid.*, hal. 16

menjawab pertanyaan penelitian dan diverifikasi. Kerangka analisis data dapat dilihat pada bagan berikut.⁹⁹



Bagan 1.2 Skema Teknik Analisis Data

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini disusun ke dalam lima bab. Bab satu, merupakan bagian pendahuluan yang menjadi kerangka penelitian. Bab dua menjelaskan tentang eksistensi dan perkembangan ISIS dari gerakan di Irak dan Syria menjadi gerakan global, keberadaan ISIS di Indonesia serta indikasinya ISIS di Kota Malang. Bab tiga menguraikan mengenai serangkaian respons, sikap, dan tindakan Pemkot Malang terkait ancaman terorisme global ISIS di Kota Malang. Selanjutnya, bab empat mengaitkan antara respons Pemkot Malang terhadap ancaman ISIS dengan konteks yang lebih luas, yakni konteks nasional dan internasional. Terakhir, bab lima menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

⁹⁹ Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif yang menjalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data berlangsung, yang disebut dengan analisis. *Ibid.*, hal. 20.